

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

M. Julvi Adri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru
E-mail : julviadri@gmail.com

diterima: 15/09/2024; direvisi: 17/10/2024; diterbitkan: 30/11/2024

Abstract: This study aims to analyze the effect of Local Original Income and Capital Expenditure on Financial Performance in the Regency/City Government of Riau Province in 2019-2024. The sampling technique used was purposive sampling with a total sample of 12 Regencies/Cities. The type of data in this study is quantitative data with secondary data sources and data collection techniques through documentation. The data analysis technique uses multiple linear regression tests. The results of this study are that Local Original Income has a positive and significant effect on Financial Performance and Capital Expenditure does not affect Financial Performance.

Keywords: *Local Original Income, Capital Expenditure.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah sistem pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru terbukti rapuh, menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan dan angka kemiskinan yang tinggi. Situasi ini semakin diperburuk oleh krisis ekonomi, yang mengganggu kualitas pelayanan publik dan berdampak pada seluruh sektor perekonomian. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun mengalami penurunan. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU Nomer No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kapasitas mereka terbatas untuk mengeksplorasi kemungkinan aliran pendapatan ialah dua masalah keuangan daerah yang dialami

Pemda di Indonesia. Uang itu berasal dari dana produksi lokal. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda ialah uang yang didapatkan daerah dengan cara dikenakan pajak dari pada aturan perundang-undangan daerahnya. Retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya adalah sumber penghasilan asli daerah yang potensial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan dapat dipandang baik ketika suatu daerah mampu mengelola potensi yang dimilikinya secara optimal, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri, yaitu melalui PAD. Tinggi rendahnya PAD mencerminkan sejauh mana kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari

wilayahnya. Oleh karena itu, semakin besar PAD suatu daerah dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya, semakin baik pula kinerja keuangannya.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah perlu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli, mengadakan, atau membangun aset tetap berwujud yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan. Pengeluaran ini digunakan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi serta jaringan, serta aset tetap lainnya”. Semakin besar belanja modal pada daerah tersebut maka dapat mengidentifikasi terhadap kinerja yang buruk. mengemukakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah (Bilqis & Priyono; 2023).

Kinerja adalah hasil yang dicapai dari rencana yang telah disusun. Ketika kinerja dijalankan sesuai dengan rencana, maka pencapaian tersebut dapat terlaksana dengan baik, didukung oleh penggunaan anggaran yang terukur dari segi kuantitas dan kualitas. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membangun ukuran kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan menjadi sangat penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Digidowiseiso & dkk; 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Menurut Siagan (2011; 10), teori keagenan merujuk pada interaksi antara principal dan agen, di mana principal menyewa agen untuk melaksanakan tugas demi kepentingan principal, termasuk pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari principal kepada agen. Secara umum, teori ini telah diimplementasikan dalam organisasi sektor publik, terutama di pemerintah daerah. Mardiasmo (2002; 20) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak yang dipercayakan (agen) untuk memberikan laporan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut.

Banyak permasalahan yang sering muncul dalam teori keagenan (*agency theory*) salah satunya asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi ialah keadaan dimana pemerintah (agen) mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan/instansi dari pada masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas APBD atau pengelolaan keuangannya dengan memberikan hasil keuangan kepada publik, yang kemudian digunakan oleh publik untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten lantaran suatu motif tertentu sehingga terjadi asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini, agen dapat melakukan kecurangan terhadap prinsipal untuk mencegah hal tersebut, maka akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dilakukan penilaian secara berkala sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan pastikan penyelenggaraan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Naw & Riharjo; 2021).

Kinerja Keuangan

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas khusus selama periode waktu khusus sebagai salah satu ruang lingkup pekerjaan. Pengukuran kinerja dipakai sebagai indikator kinerja keuangan dan non keuangan dari tugas yang diselesaikan ataupun hasil yang berhasil dari suatu kegiatan, proses ataupun unit organisasi khusus. Data dari pengukuran kinerja dapat dijadikan tolak ukur untuk program-program yang akan datang sebab penilai lebih penting dari biasanya.

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi, hasil usaha perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lainnya. Mencapai PAD yang tinggi adalah cita-cita yang patut diperjuangkan oleh setiap daerah. Tingginya PAD mencerminkan kemandirian daerah otonom, yang berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat dapat berkurang.

Rasio PAD

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini

bertujuan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, dan pada gilirannya, akan meningkatkan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan yang termasuk dalam kelompok belanja administrasi umum.

Rasio Belanja Modal

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2019-2024. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 Kabupaten/Kota.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel laporan keuangan kabupaten/kota selama 6 tahun (2019-2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	72	21.64	220.76	90.7186	30.92417
Belanja Modal	72	7.29	29.49	15.9058	4.66402
Kinerja keuangan	72	61.50	141.90	100.5828	14.63665
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Data diolah SPSS 26, (2025).

Dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 sampel (N). Berdasarkan penelitian selama periode 2019-2024, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) dan Belanja Modal (X2), sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah Kinerja Keuangan (Y).

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 90.7186. Nilai *maximum* sebesar 220.76 dan nilai *minimum* nya sebesar 21.64 sedangkan nilai *Std. Deviation* adalah 30.92417.

2. Belanja Modal (X2) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15.9058. Nilai *maximum* sebesar 29.49 dan nilai *minimum* nya sebesar 7.29 sedangkan nilai *Std. Deviation* adalah 4.66402.
3. Kinerja Keuangan (Y) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 100.5828. Nilai *maximum* sebesar 141.90 dan nilai *minimum* nya sebesar 61.50 sedangkan nilai *Std. Deviation* adalah 14.63665.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	83.396	6.681		12.482	.000		
Pendapatan Asli Daerah	.219	.052	.463	4.254	.000	.967	1.034
Belanja Modal	-.170	.342	-.054	-.497	.620	.967	1.034

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
Sumber: Data diolah SPSS 26, (2025).

Hasil Uji Normalitas Data Grafik

Tabel 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		72
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	13.02208692
Most	Absolute	.077
Extreme	Positive	.077
Differences	Negative	-.040
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

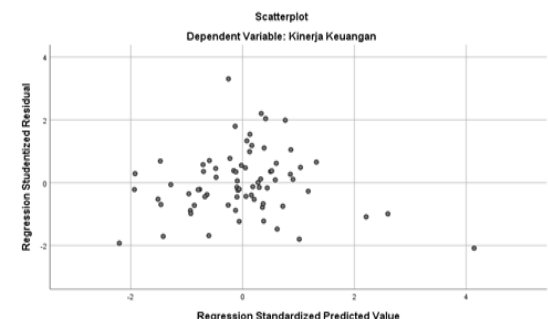
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah SPSS 26, (2025).

Berdasarkan hasil uji normalitas yang tersaji diatas diketahui bahwa nilai test statistic sebesar 0,077 dengan nilai probabilitas 0,200. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai probabilitas $0,200 > 0,05$ atau dengan arti lain asumsi klasik tentang kenormalan data terpenuhi.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang tersaji diatas diketahui bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Tolerance 0,967 dan nilai VIF 1,034, variabel Belanja Modal memiliki nilai Tolerance 0,967 dan nilai VIF 1,034. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel-variabel independen yang diteliti.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS 26, (2025).

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang tersaji diatas diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang teratur. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1.78545
Cases < Test Value	36
Cases ≥ Test Value	36
Total Cases	72
Number of Runs	33
Z	-.950
Asymp. Sig. (2-tailed)	.342

a. Median

Sumber : Data diolah SPSS 26, (2025).

Dalam Tabel 4 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,342 maka perhitungan tersebut $0,342 > 0,05$. Dari hasil keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	83.396	6.681		12.482
	Pendapatan Asli daerah	.219	.052	.463	4.254
	Belanja Modal	-.170	.342	-.054	-.497

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Data diolah SPSS 26 (2025).

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang tersaji diatas diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 83,396, variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,219 dan variabel Belanja Modal sebesar -0,170. Sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut.

$$Y = 83,396 + 0,219 + (-0,170) + e$$

Berdasarkan model regresi yang telah diperoleh, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Konstanta Nilai a (konstanta) sebesar 83,396 artinya jika semua variabel independen (pendapatan asli daerah

dan belanja modal) bernilai 0, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan nilainya naik sebesar 83,396.

2. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah

Nilai koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai positif sebesar 0,219. Hal ini berarti apabila variabel total hutang naik sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap, maka akan diikuti kenaikan nilai kinerja keuangan sebesar 0,219.

3. Koefisien regresi variabel Belanja Modal

Nilai koefisien pada variabel belanja modal -0,170 artinya apabila variabel belanja modal naik sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar 0,170 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Uji T

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	83.396	6.681		12.482
	Pendapatan Asli Daerah	.219	.052	.463	4.254
	Belanja Modal	-.170	.342	-.054	-.497

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025).

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. $T_{tabel} = t_{(a/2 : n - k - 1)} = t_{(0,05/2 : 72 - 2 - 1)} = 0,025 : 69$ maka dari itu diperoleh nilai t tabel sebesar 1,995.

1. Hasil pengujian variabel pendapatan asli daerah pada tabel 5.6 yaitu pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dapat dilihat besarnya t hitung sebesar 4,254 dengan nilai signifikansinya 0,000. Hasil uji statistik

tersebut menunjukkan bahwa t hitung $4,254 > t$ tabel $1,995$ dan nilai signifikansi menunjukkan angka $0,000 < 0,05$, sehingga hasil regresi menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pendapatan asli daerah diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan.

- Hasil pengujian variabel belanja modal pada tabel 5.6 yaitu pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dapat dilihat besarnya t hitung sebesar $-0,497$ dengan nilai signifikansinya $0,620$. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa t hitung $-0,497 < t$ tabel $1,995$ dan nilai signifikansi menunjukkan angka $0,620 > 0,05$, sehingga hasil regresi menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis belanja modal ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	3170.637	2	1585.318	9.085
	Residual	12039.807	69	174.490	
	Total	15210.444	71		

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025).

Hasil pada tabel 5.7 hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai F hitung sebesar $9,085$ untuk F tabel = $F(k ; n - k) = F(2 ; 70)$ maka diperoleh nilai F $3,13$ ($9,085 > 3,13$), dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah dan total belanja modal) secara

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.457 ^a	.208	.186	13.20946

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Data diolah SPSS 26 (2025).

Berdasarkan hasil uji diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar $0,186$ atau $18,6\%$. Hal ini mengandung arti bahwa variasi dari kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah dan belanja modal, sedangkan sisanya yakni $81,4\%$ dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah akan berkontribusi langsung terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Naw & Riharjo; 2021), dan (Antari & Sedana; 2018) yang membuktikan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andirfa & dkk; 2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -0,497 dan nilai signifikannya adalah sebesar 0,620 lebih besar dari pada 0,05 yang artinya H_2 ditolak yang artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perencanaan belanja modal yang kurang tepat sasaran, realisasi anggaran yang rendah, atau manfaat belanja modal yang bersifat jangka panjang sehingga belum terlihat pada tahun berjalan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi alokasi dan pemanfaatan belanja modal agar pengeluaran tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Leki & dkk; 2018) dan (Jauhariah; 2022) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Digdowiseiso & dkk; 2022) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan nilai F hitung sebesar $9,085 >$ nilai F tabel 3,13 dan signifikasinya 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independent (Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal) mempengaruhi variabel dependen (Kinerja Keuangan) secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi atau perubahan yang terjadi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan Belanja Modal yang optimal akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa PAD sebagai sumber pendapatan daerah serta Belanja Modal sebagai pengeluaran untuk pembangunan memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah perlu mengelola kedua aspek ini secara terintegrasi dan tepat sasaran agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Okadri & Yentisna; 2025), (Agustina; 2018), dan (Jauhariah; 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019- 2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019-2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka akan semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan yang dimiliki.
2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019-2024. Maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang dihasilkan belum mampu memberikan kontribusi terhadap meningkatkan kinerja keuangan akan tetapi seharusnya semakin tinggi belanja modal maka semakin banyak pembangunan infrastruktur dan sarana di daerah yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam pertumbuhan ekonomi
3. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama- sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau tahun 2019-2024. Maka kedua variabel independen tersebut secara bersama- samamampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga pengelolaan pendapatan asli daerah dan belanja modal yang baik dan terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,

dan produktivitas kinerja keuangan pemerintah daerah secara optimal.

Saran

1. Bagi Instansi

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber PAD yang ada, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, karena PAD terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan belanja modal agar alokasi belanja modal benar- benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat langsung maupun jangka panjang terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Mengingat PAD dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka sinergi pengelolaan pendapatan dan belanja perlu ditingkatkan, misalnya melalui penganggaran belanja modal yang berbasis pada potensi PAD, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang juga berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti dana perimbangan, belanja operasional, atau belanja pegawai, agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang, metode panel data, atau analisis lain seperti SEM atau uji moderasi untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indikator kinerja keuangan lain selain rasio efektivitas,

misalnya rasio efisiensi atau rasio ekonomis, sehingga analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari berbagai perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afia Maulina, Mustafa Alkamal, N. S. F. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 5(2).
- Agustina, L. R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di *Indonesia*. Universitas Islam Negeri, 1080.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 5(3).
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). *Pengaruh Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten / Kota Provinsi Riau*. 4(1).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2), 1080.
- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2373-2390.
- Azis, M. I. (2020). *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara*. 18(2), 122–129.
- Azzahra, A. A. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020*. Jurnal Economina, 2(2), 612-621.
- Budhi, I. M. K. S., & Dewi, N. W. N. (2015). *Pengaruh Pendaptan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(11), 44581.
- Budianto, A. (2021). *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020*. Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak, 32, 1-18.
- Defitri, S. Y. (2020). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)*. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19(2), 107-119.
- Digdownseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Fair Value:

- Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(6), 2572-2580.
- Ester Trivona Naw, ikhsan B. R. (2021). *Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta
- Febriyanti, E. M. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal Mirai Management, 7(3), 629-637.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS Edisi Sembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.
- Hartiningsih, N., & Halim, E. H. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau*. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, 7(2), 258-269.
- Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 24(2), 157-170.
- Indonesia, P. R. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Media Hukum, 184.
- Jauhar, F. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi, 4(1). JAUHAR, F. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*.
- Jauhariah, M. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2014- 2021* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Korry, I. N. S. (2018). *Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras*. Kertha Wicaksana, 12(1), 76-79.
- Kumba Digidowiseiso, Bambang Subiyanto, R. D. C. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 4(6), 2572-2580.
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumual, J. I. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(5).
- Maharani, R., Fadjar, A., & Sastrawan, E. (2023). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Manajemen Kreatif Jurnal, 1(2), 186-196.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 5(2), 390-399.
- Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M. E. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh*. 30–38.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2015). *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015)*. XV(1), 57–66.
- Ni Made Diah Permata sari, I. K. M. (2019). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 8(8), 4759–4787.
- Novi Natalia Padang, W. S. P. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. 9(2), 303–318.
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 6(1), 430-443.
- Okadri, A. S. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020- 2024*. Journal of Business Economics and Management| E- ISSN: 3063-8968, 1(3), 558-566. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 terkait Pedoman Penyusunan APBD.
- Purba, D., Damanik, D., & Purba, E. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun*. Jurnal Ekuilnomi, 3(2), 115-126.
- Ramadhan, A., & Sam, I. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021*. 1(4), 104–118.
- Resa N, F. indra A. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021*. 6(1), 430–443.
- Riswati, R., & Bukhori, Y. (2023). *Analisis rasio keserasian belanja modal dan operasional serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah di pemerintahan Kota Bandung*. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1), 41-55.
- Rizal, Y. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Langsa*. Jurnal Samudra Ekonomika, 3(1), 74-83.
- Sangin, I. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus Kantor BPKAD Kota Palopo)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO).
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja*

Keuangan Pemerintah Daerah
(Doctoral dissertation, Udayana University).

- Siregar, A. O. D., & S, I. M. (2020). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat)**. 9(1), 1–19.
- Sofi, I. (2017). **Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo**. Jurnal Defis, I, 111.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL-DEFIS-EDISI-V CETAK.pdf>
- Sugiyono, S. (2016). **Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D**. Bandung: Alfabeta, 1(11).
- Suhaedi, W. (2019). **Analisis Belanja Daerah**. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 18(2), 63.
- Supriyadi, A. P., & Ahmad, F. (2021). **Analisis Rasio Efektifitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019**. Jurnal Khatulistiwa Informatika, 8(1), 39-43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 terkait **Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahyudin, I. (2020). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat**. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 86-97.